

Implementasi Program Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Probolinggo (SIKePPo)

Husni Mubaraq

Universitas Panca Marga

Binti Nasikhatul Ummatin

Universitas Panca Marga

Universitas Panca Marga Jl. Raya Dringu, Krajan, Pabean, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67216

Korespondensi penulis: ichamma31@gmail.com

Abstract: *To improve and supervise the performance of the State Civil Apparatus (ASN) within the Probolinggo Regency Government, the local Regional Personnel Agency (BKD) made a breakthrough with a reporting application. Performance reporting through an application called SIKePPo or the Probolinggo Regency Government Employee Performance Information System application. The program implementation by the Regional Personnel Agency (BKD) of Probolinggo Regency seeks to improve personnel management and administration quickly, precisely and accurately. Although this program has been implemented well, it has not yet achieved optimal results. This study seeks to analyze the effectiveness of the implementation of program policies in the BKD of Probolinggo Regency. The two problems studied are: (1) the effectiveness of the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD, and (2) the factors that influence the implementation of the SIKePPo program. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD and the factors that hindered the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD. The approach used in this research is descriptive qualitative method with the application of Edwards III theory and Bambang Sunggono theory. Data was collected by means of observation, in-depth interviews, and documentation. The selection of informants used purposive sampling technique, and qualitative data analysis was inductive. The results showed that the implementation of the web-based SIKePPo program at the BKD of Probolinggo Regency was running quite well in accordance with the four elements that determine policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The factors that become obstacles in the implementation of the web-based SIKePPo program at the Probolinggo District BKD are related to policy content, HR support, infrastructure and communication facilities.*

Keywords: *Implementation, SIKePPo web-based program*

Abstrak: Untuk meningkatkan dan pengawasan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat membuat terobosan dengan aplikasi pelaporan. Pelaporan kinerja melalui aplikasi bernama SIKePPo atau aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan program oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Probolinggo berupaya meningkatkan manajemen dan administrasi kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat. Kendatipun program ini telah terlaksana dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Penelitian ini berupaya menganalisis efektivitas implementasi kebijaksanaan program di BKD Kabupaten Probolinggo. Dua masalah yang dikaji adalah: (1) efektifitas implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo, dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program SIKePPo tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo dan faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edwards III dan teori Bambang Sunggono. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo sudah berjalan cukup baik sesuai dengan empat unsur yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo menyangkut isi kebijakan, dukungan SDM, sarana prasarana dan komunikasi.

Kata kunci: Implementasi, SIKePPo, program berbasis web

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan daerah desentralisasi. Dengan digunakan asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut diberikan wewenang untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip otonomi daerah pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berarti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Probolinggo (SIKePPo) merupakan penerapan *e-Government* dalam pemerintahan yang berfungsi untuk mengelola data, manajemen dan administrasi kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. SIKePPo diselenggarakan dalam mengelola data kepegawaian secara cepat, tepat dan akurat untuk mendukung kebijaksanaan manajemen administrasi kepegawaian.

Tujuan Implementasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Probolinggo (SIKePPo) adalah dapat terwujudnya suatu sistem informasi manajemen yang berintegrasi dalam suatu jaringan komputer yang mampu menghasilkan informasi yang bermutu untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan khususnya antara lain menghasilkan data kepegawaian yang valid untuk membantu pimpinan dalam merencanakan penyusunan formasi, pengadaan, mutasi, promosi/ demosi dan pengembangan karier pegawai di masa yang akan datang.

Sama halnya dengan Pemerintah Propinsi di Jawa Timur, di Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk meningkatkan dan pengawasan kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Probolinggo, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat membuat terobosan dengan aplikasi pelaporan. Pelaporan kinerja melalui aplikasi bernama Sikeppo atau aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo dimulai sejak 1 Februari lalu. Penerapan pelaporan aktivitas harian jabatan ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bupati Probolinggo Nomor: 820/96/426.202/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Namun dalam kenyataannya bahwa implementasi SIKePPo berbasis web di BKdD Kabupaten Probolinggo masih mengalami berbagai kendala, sehingga pengelolaan administrasi kepegawaian terutama pengolahan data kepegawaian tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Pertama, di mana data kepegawaian sangat fluktuatif (perubahan data kadang bertambah kadang berkurang setiap saat) dan dinamis (bergerak terus) seiring dengan perkembangan jaman dan arus teknologi globalisasi. Data Kepegawaian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi kepegawaian seseorang. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan Nama, NIP, Alamat, Jumlah Keluarga, SK CPNS, SK PNS, Kepangkatan, Jabatan, Organisasi atau Unit Kerjanya, Gaji, Jenjang dan Tingkat Pendidikan, serta Diklat-diklat yang pernah diikuti baik teknis maupun fungsional. Kedua, begitu dinamisnya data kepegawaian membuat data yang dimiliki oleh masing-masing pegawai menjadi kurang lengkap (*update*).

Dengan belum lengkap data kepegawaian dalam SIKePPo berbasis web menyebabkan informasi data kepegawaian pada Pemerintah Kabupaten Badung belum akurat dan valid. Di samping data belum valid, dukungan SDM yang memiliki pendidikan TI yang ada namun belum memiliki kompetensi programmer dan masih bergantung pihak ketiga (rekanan). Demikian pula koordinasi antar bidang di BKD Kabupaten Probolinggo belum berjalan optimal maksudnya di BKD Kabupaten Probolinggo terdiri dari 3 (tiga) bidang dan sekretariat, tiap bidang mempunyai tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) masing-masing harus dilaksanakan namun belum berjalan optimal. Disamping itu pula terjadi perubahan struktur kelembagaan juga mempengaruhi kevalidan data kepegawaian maksudnya setiap ada perubahan struktur kelembagaan proses menginput mutasi jabatan struktural maupun fungsional membutuhkan waktu yang cukup lama.

Penulis tertarik mengkaji permasalahan ini, disebabkan karena implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo masih mengalami kendala maupun permasalahan. Disamping permasalahan tersebut di atas, juga permasalahan yang lain diantaranya koordinasi antar bidang di BKD masih lemah terutama dalam melaksanakan tupoksi masing-masing. Dalam hal ini Kepala BKD Kabupaten Probolinggo, Doddy Nur Baskoro, melalui Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan Handik Hariyanto mengungkapkan, pelaporan aktivitas harian jabatan melalui aplikasi SIKEPPO ini dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, efektivitas pelaksanaan tugas, peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun dalam implementasinya masih belum optimal. Padahal SIKePPo sudah memberikan kemudahan-kemudahan dengan fasilitas menu sesuai kebutuhan masing-masing bidang.

Berdasarkan identifikasi di atas permasalahan adalah Bagaimanakah implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo? dan Faktor-faktor apa yang

menghambat implementasi program SIKePPo itu sendiri? Adapun Tujuan penelitian ini dibagi 2 yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memahami implementasi kebijakan pada instansi pemerintah di Pemerintah Kabupaten Probolinggo, sedangkan tujuan khususnya adalah (1) Untuk mengetahui implementasi program SIKePPo di BKD Kabupaten Probolinggo dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKPSDM Kabupaten Probolinggo.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Menurut James Andersen, kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah.

Implementasi kebijakan merupakan suatu analisis dengan lebih melakukan retropeksi dari pada prospeksi dengan tujuan ganda, yaitu pertama memberi informasi bagaimana program-program tersebut dapat terlaksana, kedua menunjukkan faktor-faktor yang dapat diubah agar diperoleh capaian hasil yang lebih baik yang dapat memberikan perubahan implementasi atau program baru.

Sebagaimana Budi Winarno (2012:158) menyatakan proses implementasi memiliki variabel atau faktor yang membentuk kaitan (*linkage*) antara kebijakan dan pencapaian (*performance*). Variabel tersebut merupakan variabel bebas dan variabel terikat yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2012: 177), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta, sehingga pada akhirnya akan mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Kinerja Pegawai Kabupaten Probolinggo (SIKePPo)

Sistem informasi terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu sistem dan informasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari orang yang sistematis dan terstruktur serta menjalankan fungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sedangkan informasi dapat diartikan sejumlah

data yang telah diolah dan memiliki kegunaan untuk suatu tujuan tertentu. Sehingga Sistem informasi didefinisikan sebagai perangkat lunak yang membantu mengatur dan menganalisa data.

Pengertian SIKePPo Sistem Informasi bisa dikatakan suatu totalitas yang terpadu yang terdiri atas perangkat lunak; perangkat penyimpanan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, bergantung, dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

Program Berbasis web

Dalam perangkat lunak (software), aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dapat diakses menggunakan penjelajah web (web browser) melalui jaringan seperti internet atau intranet. Aplikasi berbasis web juga merupakan aplikasi perangkat lunak komputer yang dikodekan dalam bahasa pemrograman yang didukung penjelajah web (web browser) seperti HTML, ASP, Perl, Java, Java Script, PHP, Python, Ruby dan bahas pemrograman lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif. Moleong (2012:6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dan analisis data dengan kualitatif bersifat induktif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Sistem Informasi Kinerja Pegawai (SIKePPo) berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo

Implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo dianalisis melalui sudut teori implementasi kebijakan publik dari George C Edwards (Edwards III) yang mencakup unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing unsur tersebut berdasarkan data empiris di BKD Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut:

Implementasi program SIKePPo berbasis web dapat berjalan efektif bila proses komunikasi yang dilakukan di BKD Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya yang ada. Komunikasi

dalam implementasi program SIKePPo dapat dilakukan dengan penyampaian informasi yang jelas dan adanya konsistensi penyampaian informasi secara baik akan mendorong aparaturnya untuk lebih meningkatkan pelayanannya. Penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik juga. Dalam penyaluran komunikasi seringkali terjadi permasalahan. Ini disebabkan adanya salah pengertian (miskomunikasi) karena semakin banyak lapisan birokrasi yang harus dilewati dalam proses komunikasi, maka semakin besar peluang perintah diabaikan dan distorsi di tengah jalan.

Untuk menunjang pelaksanaan implementasi program SIKePPo di BKD Kabupaten Probolinggo, informasi yang digunakan melalui media sosial dalam bentuk grup Whatsapp (WA) dan email. Media sosial ini digunakan sebagai wahana komunikasi mengenai permasalahan-permasalahan terkait implementasi program SIKePPo berbasis web. Secara tidak langsung media sosial tersebut operator SIKePPo dapat melakukan konsultasi dan usul perbaikan data kepegawaian pada program SIKePPo. Penyampaian informasi melalui grup WA dan email sudah berjalan baik dan cukup efektif.

Pada implementasi program SIKePPo di BKD Kabupaten Probolinggo, pada internal BKD kewenangannya sudah cukup jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang, namun dalam koordinasi perlu ditingkatkan dan dimantapkan.

Fasilitas dalam implementasi program SIKePPo terbagi dalam 2 bagian yaitu fasilitas fisik dan fasilitas aplikasi. Fasilitas fisik merupakan sarana dan prasarana kerja sudah cukup memadai untuk menunjang keberhasilan implementasi program SIKePPo tersebut. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah meja dan kursi, seperangkat komputer, laptop, printer, jaringan internet, listrik, dan telepon. Setiap pegawai admin telah dilengkapi dengan seperangkat komputer dan/atau laptop. Jaringan LAN dan wifi tersambung ke seluruh ruangan yang ada di Kabupaten Probolinggo dan kantor kecamatan maupun kelurahan serta di sekolah-sekolah. Sedangkan fasilitas aplikasi tidak kalah pentingnya karena merupakan roh dari kebijakan ini. Adapun fasilitas aplikasi ini adalah program SIKePPo itu sendiri yang berbasis web dan dapat diakses melalui website BKD <https://skp.bkd.probolinggo.kab.go.id/keppo/app/>

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi program SIKePPo ini. Salah satu aspek yang terpenting dalam BKD Kabupaten Probolinggo adalah dengan adanya pembagian tugas dan *standard operational procedure* (SOP).

Bahwa pada pembagian tugas sesuai dengan struktur organisasi BKD dan tupoksinya sudah berjalan dengan baik, namun koordinasi perlu ditingkatkan.

SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu instansi untuk mencapai tujuannya. SOP merupakan tata cara atau

tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Implementasi program SIKePPo sudah ada SOP nya. Dengan SOP menjadi acuan dan memudahkan dalam melaksanakan kegiatan maupun tugas. Dengan SOP, tata cara dan waktu yang dibutuhkan dalam implementasi program SIKePPo sudah jelas dan transparan.

Disposisi mencakup pengangkatan birokrasi dalam hal ini pengangkatan admin dan operator SIKePPo dan insentif. Pada pengangkatan dan penunjukkan admin dan operator SIKePPo sesuai dengan bidang tugas staf tersebut. Disamping itu, staf tersebut mempunyai kemampuan dan komitmen. Pengangkatan admin maupun operator SIKePPo sudah berjalan cukup baik, namun komitmennya perlu ditingkatkan. Untuk saat ini, admin dan operator SIKePPo belum dapat insentif khusus, namun seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Badung sudah mendapatkan tunjangan beban kerja.

Faktor-Faktor yang Menghambat Implementasi Program SIMPEG Berbasis Web di BKPSDM Kabupaten Badung

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa implementasi program SIKePPo di BKD Kabupaten Probolinggo sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa kendala yang ada dalam implementasi menjadi faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi program SIKePPo di BKD Kabupaten Probolinggo.

Berikut ini akan di analisis faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi program SIMPEG berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo mengacu kepada teori menurut Bambang Sunggono. Terdapat empat unsur yaitu:

- **Isi Kebijakan**

Dalam isi kebijakan dijumpai beberapa kendala yaitu untuk mengantisipasi data kepegawaian yang fluktuatif dan dinamis dibutuhkan komputer server yang mempunyai kapasitas penyimpanan lebih besar dan lebih cepat aksesnya. Untuk skala prioritas, update data kepegawaian belum optimal. Pada pelaksanaan implementasi program SIKePPo masih ada kekurangan baik pada data kepegawaiannya maupun aplikasinya. Disamping kendala-kendala di atas, kendala lainnya pada isi kebijakan yaitu waktu pelaksanaan dan sumber daya manusia itu sendiri.

- **Informasi**

Pada penyampaian informasi program SIKePPo belum optimal, hal ini disebabkan karena pada saat rapat koordinasi dan sosialisasi diwakilkan. Akibatnya informasi terkait program SIKePPo yang diinginkan tidak berjalan sesuai dengan rencana.

- **Pembagian Potensi**

Pembagian potensi sudah jelas sesuai dengan struktur organisasi, namun dalam pelaksanaan koordinasi perlu ditingkatkan. Kendala lain yaitu penunjukkan admin dan operator SIKePPo belum dilengkapi SK Bupati Probolinggo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo dapat ditarik simpulan sebagai berikut: Implementasi program SIKePPo berbasis web di BKD Kabupaten Probolinggo berdasarkan unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengancukup baik. Unsur-unsur implementasi tersebut meneguhkan kembali tesis yang dikemukakan oleh Edwards III. Akan tetapi dalam penerapannya, masih dijumpai sejumlah kendala terutama terkait dengan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi programmer, komitmen pelaksana, penambahan kapasitas server, pengangkatan admin dan operator SIKePPo dengan SK Bupati Probolinggo, dan koordinasi admin antar bidang di BKD Kabupaten Probolinggo. Maka dari itu peningkatan mutu SDM yang berkompeten menjadi sangat penting guna mendapatkan kinerja pelayanan yang lebih prima serta untuk mencapai tingkat kepuasan yang bagus, Hal ini bisa terlaksana dengan banyak cara seperti penyaringan dalam tahap perekrutan secara mendetail serta pemeberian pelatihan pra kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sampaikan rasa terima kasih kepada diri penulis, kepada pihak pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan jurnal ini baik secara materil maupun non materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Dengan penuh rasa syukur pada akhirnya jurnal ini telat selesai penulis rampungkan. Meskipun tanpa pendanaan eksternal, semangat kami untuk berkontribusi pada ilmu pengetahuan tetap tidak tergoyahkan. Kolaborasi yang kuat dan semangat berbagi pengetahuan adalah yang mendasari keberhasilan jurnal ini.

Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah berperan dalam kesuksesan jurnal ini. Semoga jurnal ini terus menjadi wahana bagi pengetahuan yang bermanfaat dan penelitian yang inspiratif.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, M. Khoirul. 2004. *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*, SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anderson, James E. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Abdul Wahab, S.. 2008, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Afabeta.
- Dunn, William N.. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT Hanindita Graha Widya.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Publik Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc. <https://probolinggokab.go.id/mulai-terapkan-pelaporan-kinerja-pegawai-lewat-aplikasi-sikeppo/>
- Moleong, Lexy J.. 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafi